

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang  
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Tentang Yayasan

Kementerian Hukum dan Ham RI, Petunjuk Teknis Pengesahan Badan Hukum  
Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13  
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan  
Hukum Yayasan, Pasal 3

### Penelitian Terdahulu

Cahyono, P. A. (2006). Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pengesahan Yayasan  
[Tesis, Universitas Diponegoro].

Harahap, K. (2023). Pedoman Transliterasi Arab-Latin [Tesis, UIN Syahada].

Kartika, D. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pendirian Yayasan  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2004 [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].

### Buku

Ahmad, S. (2024). Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik di Era  
Digital. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ali, Z. (2020). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asshiddiqe, J. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqe, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chatamarrasjid, A. (2016). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habib, A. (2019). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UUJN*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib, A. (2023). *Hukum Notaris Indonesia: Dinamika Praktik dan Regulasi Terkini*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, R. (2026). *Etika dan Diskresi Pejabat Publik dalam Pelayanan Administrasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Manan, B. (2004). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mulyadi, D. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stout, H. D. (1995). *De Bevoegdheid van de Overheid*. Alphen aan den Rijn: Samsom Uitgeverij.
- Sudarsono. (2021). *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Fauzi, M. (2021). Analisis Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Proses Pengesahan Badan Hukum Yayasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).
- Lestari, D. P. (2023). Legalitas Penggunaan Istilah Asing dan Arab pada Nama Badan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3).
- Prasetio, A. (2022). Problematika Inkonsistensi Pelayanan Administrasi Badan Hukum pada Ditjen AHU. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2).

- Pratama, R. A. (2020). Problematika Yuridis Pendaftaran Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem AHU Online. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, 5(2).
- Pratama, R. A. (2024). Transformasi Pelayanan Publik: Tantangan Standarisasi di Era Administrasi Digital. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, 9(1).
- Ramadhan, T. (2025). Pendekatan Substantif vs Formalistik dalam Sistem AHU Online: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Indonesia Law Review*, 10(2).
- Sari, N. K. (2022). Analisis Kebijakan Penggunaan Unsur Keagamaan dalam Penamaan Badan Hukum Sosial. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 8(1).
- Setiawan, B. (2025). Analisis Perlindungan Hak Perdata Yayasan dalam Proses Pendaftaran Digital. *Mimbar Hukum*, 37(1).
- Wiyono, S. (2024). Batas Kewenangan Diskresi dalam Pendaftaran Organisasi Sosial di Era Transformasi Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(3).
- Zulkarnain, I. (2023). Prinsip Transparansi dan Kepastian Hukum dalam Penamaan Badan Hukum Yayasan. *Jurnal Konstitusi*, 20(4).